

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Bimbingan dan konseling merupakan salah satu bagian dari pendidikan yang terkait dengan program pemberian layanan secara berkesinambungan dalam upaya membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya dalam segala aspek kehidupannya (pribadi, sosial, belajar, dan karir). Menurut Yusuf (2008, hlm. 2) peserta didik yang sedang belajar di sekolah merupakan subjek dari layanan bimbingan dan konseling yang sedang berkembang ke arah kematangan atau kemandirian yang memiliki keunikan serta potensi yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, diperlukan peranan bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan yang dapat menstimulasi peserta didik menuju kematangannya.

Peserta didik yang menjadi subjek layanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan individu yang beragam. Menurut Pedersen (1990; dalam Wibowo, 2015) keragaman tersebut mencakup berbagai variabel, yaitu: variabel etnografik (seperti etnisitas, kewarganegaraan, agama, dan bahasa), variabel demografik (seperti umur, gender, tempat tinggal dan sebagainya), dan variabel status (seperti latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan serta afiliasi keanggotaan formal atau informal). Keragaman tersebut kemudian membentuk suatu budaya yaitu sekelompok orang yang mengidentifikasi atau berasosiasi satu dengan yang lain berdasarkan pada kesamaan tujuan, kebutuhan, atau latar belakang. Menurut Widiyatmadi (2015) dalam bimbingan dan konseling, realitas budaya dengan segala kaitannya terhadap perasaan, pikiran, dan perilaku manusia sangat penting dipahami, sejak dari membangun konsep, model, teori, pengembangan, hingga kemampuan menjawab permasalahan, dan menemukan solusi terkait dengan individu atau masyarakat sebagai pihak yang dilayani.

Konseling merupakan layanan bantuan yang diberikan seorang konselor kepada konseli dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi konseli ataupun dalam upaya membantu konseli mencapai perkembangan yang optimal. Dalam hal ini layanan konseling tersebut dilakukan

oleh Guru BK dan peserta didik. Layanan konseling bersifat individual dan sangat memperhatikan keragaman budaya konseli. Keragaman budaya dalam layanan konseling menyadarkan Guru BK tentang pentingnya kompetensi konseling multibudaya dalam menghadapi perbedaan, sekecil apapun perbedaan tersebut. Guru BK perlu mengubah persepsi mereka, mencukupkan diri dengan pengetahuan tentang budaya, memahami bentuk-bentuk diskriminasi, stereotip dan rasisme (Holcomb-McCoy, 2004, hlm. 294). Guru BK harus menghargai keberagaman peserta didik (Depdiknas, 2007, hlm. 12). Interaksi sosial yang terbentuk dalam suatu keberagaman memerlukan suatu pemahaman lintas budaya (Matsumoto, 1998). Oleh karena itu pengetahuan atau pemahaman multibudaya diketahui sebagai salah satu komponen dari kompetensi konseling multibudaya.

Guru BK perlu memiliki kompetensi konseling multibudaya juga dikarenakan permasalahan yang dialami peserta didik di sekolah tidak jarang berkaitan dengan keragaman budaya peserta didik. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Supriadi (2001, hlm. 66) diketahui bahwa semakin sering persoalan-persoalan yang bersumber dari keragaman budaya konseli muncul dan sulit dipecahkan dalam proses pendidikan dan konseling di sekolah; sementara para Guru BK, dan bahkan sistem persekolahan belum secara sengaja disiapkan untuk menghadapi keadaan tersebut. Perilaku *maladjustment* peserta didik untuk tingkat tertentu sangat terkait dengan latar belakang peserta didik tersebut dan ke mana afiliasi kelompoknya, apakah itu etnik, ras, asal daerah, atau bahkan status sosial ekonomi keluarganya.

Pentingnya kompetensi multibudaya telah muncul sebagai topik penting dalam profesi pelayanan manusia dan pengajaran (Ridley & Kleiner, 2003; Kagnici, 2011), khususnya di bidang pendidikan konseling (Kagnici, 2011). Kemampuan konselor untuk sadar akan budaya mereka sendiri dan kelompoknya agar lebih efektif melayani masyarakat dan kelompok beragam budaya adalah kekhawatiran untuk semua konselor di Amerika Serikat (Vacc, Nicholas A. dkk. 2003, hlm. 10). Kekhawatiran tersebut tidak hanya timbul pada konselor di Amerika Serikat, Guru BK di Indonesia memiliki kekhawatiran-kekhawatiran

akan keefektifan layanan konseling yang diberikannya, khususnya konseling dengan peserta didik dari latar belakang budaya yang beragam.

Kekhawatiran-kekhawatiran tersebut dinyatakan oleh beberapa Guru BK yang bekerja di lingkungan konseli yang multibudaya, yaitu Fathul Ilmi, S.Pd., Nurul Fahmi, S.Pd., dan Dian Ramadhani, S.Pd.. Berdasarkan hasil studi pendahuluan sederhana berupa wawancara tidak terstruktur terhadap tiga orang konselor di SMA Bandung tersebut dapat dilihat bahwa kekhawatiran-kekhawatiran tersebut timbul karena bias-bias budaya yang ada sangat rentan terjadi pada proses konseling dengan konseli yang memiliki latar belakang budaya berbeda. Tiga orang Guru BK tersebut menyatakan bahwa proses konseling yang dilakukan dengan konseli yang berbeda latar belakang budaya tidak terlepas dari nilai-nilai budaya yang dianut Guru BK, mereka cenderung membawa nilai-nilai budaya yang ada pada diri mereka dalam proses konseling dengan konseli yang berlatar belakang budaya berbeda, sehingga peserta didik yang berbeda latar belakang budayanya dengan Guru BK berusaha menyesuaikan diri dengan nilai-nilai budaya Guru BK dalam proses konseling.

Hubungan Guru BK-peserta didik yang menjadi konseli dalam proses konseling pada dasarnya merupakan hubungan dua orang yang memiliki budaya yang berbeda. Perhatian terhadap latar budaya peserta didik penting untuk dilakukan mengingat faktor budaya memiliki kontribusi terhadap pelaksanaan konseling. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Supriadi (2001, hlm. 10) bahwa efektivitas proses konseling sangat ditentukan oleh latar belakang budaya konseli yang sangat beragam, apalagi dalam konteks masyarakat multibudaya seperti di Indonesia. Latar belakang budaya yang memprivadi dalam diri konseli merefleksikan cara pandang konseli terhadap masalah dan tingkah laku konseli dalam menghadapi masalah.

Menurut Wibowo (2015) keefektifan suatu konseling bergantung pada banyak faktor, salah satu faktor yang terpenting adalah hubungan satu sama lain, dan saling mengerti antara konselor dan konseli. Hubungan seperti itu biasanya lebih mudah tercapai jika konselor dan konseli berasal dari budaya yang sama atau tidak asing dengan latar belakang masing-masing. Penelitian yang

dikemukakan oleh Harrison (Atkinson, 1985; Supriadi, 2001, hlm. 26) bahwa konseli cenderung lebih menyukai konselor dari ras yang sama (*counselee tend to prefer counselor of the same race*). Namun, bukan hal yang mustahil jika konselor akan membantu konseli yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda.

Keberbedaan dan keberagaman budaya yang menjadi latar pribadi Guru BK dan peserta didik cenderung dapat menghambat pelaksanaan konseling. Aktualisasi dari budaya seperti bahasa, nilai, stereotip, kelas sosial dan semisalnya dalam kondisi tertentu dapat menjadi sumber penghambat proses pencapaian tujuan konseling. Disamping itu, model pendekatan konseling yang dipergunakan Guru BK untuk membantu mengentaskan masalah konseli, yang *notabene* merupakan salah satu ciri profesionalitas profesi konseling juga merupakan produk suatu budaya tertentu yang karenanya dalam penerapannya juga belum tentu sesuai dengan budaya konseli. Oleh karena itu, menurut Supriadi (2001, hlm. 33) Guru BK harus memiliki kesadaran budaya agar terhindar dari kecenderungan memukul rata semua individu yang ditanganinya yang kebanyakan berasal dari lingkungan sosial-budaya yang berbeda-beda sehingga dalam menerapkan teknik-teknik konseling, Guru BK yang sadar budaya akan secara kritis menguji di antara teknik-teknik tersebut yang *culturally unique* dan *universally applicable*.

Menurut Wibowo (2015) menghormati perbedaan dalam segala bentuk adalah penting sebagai landasan kerja dalam konseling. Tanpa pendirian seperti ini, kesejahteraan dari konseli terancam dan rasa hormat dan martabat yang seharusnya dimiliki setiap orang menjadi terabaikan. Bahkan perilaku negatif terhadap konseli karena usia, jenis kelamin, orientasi seksual, etnik, kerohanian, telah diketahui dapat berpengaruh buruk terhadap proses konseling. Tanpa kesadaran dan pengetahuan tentang ras, budaya, dan etnis, konselor dan profesi pelayanan lainnya tanpa disadari bisa terlibat dalam penindasan budaya (Sue and Sue, 2008, hlm. 49). Budiman (2016, hlm. 2) mengemukakan bahwa bagi konselor, secara filosofis kompetensi multibudaya digunakan untuk memfasilitasi konseli atau peserta didik berkembang optimal dan dapat hidup harmoni dalam keberagaman.

Berdasarkan pemaparan di atas perlu adanya suatu upaya untuk dapat mengembangkan kompetensi konseling multibudaya Guru BK. Selain itu, data mengenai kompetensi konseling multibudaya Guru BK didukung dengan hasil studi pendahuluan yang dilakukan terhadap 30 orang Guru BK SMA di Kota Bandung. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kompetensi konseling multibudaya Guru BK berada pada kategori sangat kompeten 6,67%, kompeten 36,67%, cukup kompeten 27%, kurang kompeten 27%, dan tidak kompeten 3,33%. Indikator Guru BK yang kurang dan tidak kompeten yaitu: (1) rendahnya kesadaran Guru BK mengenai asumsi, nilai, dan polemik diri sendiri; (2) rendahnya pemahaman mengenai pandangan hidup (*worldview*) konseli yang berbeda budaya; dan (3) rendahnya kemampuan mengembangkan strategi dan teknik intervensi (konseling yang sesuai).

Paparan data mengenai kompetensi konseling multibudaya Guru BK di atas dapat dijadikan acuan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengembangan kompetensi multibudaya Guru BK, khususnya kompetensi konseling multibudaya. Kesadaran akan pentingnya pengembangan kompetensi multibudaya didasari oleh pemikiran bahwa tekanan perkembangan multibudaya sekali-kali dapat menjadi sumber konflik batin berkepanjangan, menjadi *stressor*, menyebabkan termarjinalkannya kelompok etnik tertentu, dan resiko-resiko lainnya yang mungkin terjadi (Kartadinata, S, 2011, hlm. 3; Budiman, N, 2016, hlm. 2). Kompetensi konseling multibudaya konselor menurut Hussin (2015) meliputi tiga domain utama: yaitu keyakinan dan sikap (*belief and attitude*), pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*).

Peringatan dari kekurangan program pelatihan konselor dan rekomendasi pelatihan untuk program pelatihan multikultural telah datang dari berbagai konferensi psikologi dan pendidikan pascasarjana, seperti dari tahun 1973 di *Vail Conference*, tahun 1975 pada *Austin Conference*, ACES *Commission on Non-White Concerns* pada tahun 1978, Komisi Presiden tentang Kesehatan Mental pada tahun 1978, Konferensi Dulles pada tahun 1978, dan Konferensi Nasional Pascasarjana Pendidikan Psikologi pada tahun 1987 (Sue & Arredondo, 1992; Sommers, 2008, hlm. 8). Program pelatihan konselor menawarkan kursus

konseling multibudaya dengan harapan memfasilitasi kompetensi konseling multibudaya (Ridley, Mendoza, & Kanitz, 1992; Castillo, Linda G, dkk, 2007). Penelitian telah menemukan bahwa pelatihan multibudaya secara signifikan memiliki kaitan dengan kompetensi konseling multibudaya (D'Andrea, Daniels, & Heck, 1991; Neville dkk, 1996; Sadowsky, Kuo-Jackson, Richardson, & Corey, 1998; Linda G, dkk, 2007).

Pengembangan kompetensi multibudaya Guru BK selama ini dilakukan melalui pelatihan di ruang kelas (Sadowsky, *et al.*, 1998; Budiman, N, 2016, hlm. 3), pemahaman dan praktik lapangan (Linwood G.V., Nichole R.H., and Done T.M., 2008; Budiman, N, 2016, hlm. 3), pelatihan keterampilan konseling multibudaya mahasiswa program magister (Ruth, C and Lien, C., 2013; Budiman, N, 2016, hlm. 3), dan pengembangan kompetensi multibudaya melalui perkuliahan konseling multibudaya (Spanierman, L.B., 2014; Budiman, N, 2016, hlm. 3), dan proyek seperti *multicultural action project* (Carlos, 2011; Budiman, N, 2016, hlm. 3).

Awalnya *Multicultural Action Project* (MAP) dirancang dalam bentuk tugas selama satu semester dalam mata kuliah konseling multibudaya. Sebagai bagian dari *Multicultural Action Project* (MAP), mahasiswa mengidentifikasi masyarakat yang berbeda budaya dari latar belakang budaya mereka pada satu atau lebih variabel, variabel tersebut dalam hal ini adalah ras, etnik, jenis kelamin, orientasi seksual, kemampuan, atau usia. Selanjutnya, mahasiswa mengidentifikasi emosi, pendidikan, dan tujuan profesional pada masyarakat tertentu dan mengembangkan sebuah rencana kegiatan untuk melengkapi setiap levelnya, meliputi: observasi (*observation*), pencarian informasi (*information seeking*), dan kegiatan langsung (*direct action*).

Pelatihan *Multicultural Action Project* (MAP) untuk meningkatkan kompetensi konseling multibudaya Guru BK SMA di Kota Bandung diadaptasi dari *Multicultural Action Project* (MAP) yang dikembangkan oleh Max Parkers. Pelatihan MAP yang dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan melibatkan tiga orang konselor SMA di Kota Bandung secara tatap muka langsung dalam beberapa sesi pelatihan (*face to face*). Pelatihan ini bertujuan

untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan Guru BK dalam melaksanakan konseling dengan konseli yang memiliki latar belakang budaya berbeda dengan Guru BK tersebut. Pelatihan *Multicultural Action Project* (MAP) diharapkan dapat menjadi pelatihan yang efektif dalam meningkatkan kompetensi konseling multibudaya Guru BK, khususnya Guru BK SMA di Kota Bandung.

## **B. Identifikasi Masalah Penelitian**

Konseling multibudaya sekarang menjadi begitu penting, ketika perjumpaan budaya dalam masyarakat global menjadi semakin terbuka dan hampir tanpa batas. Konseling multibudaya atau konseling berbasis budaya menurut Rakhmat (2008, hlm. 2) merupakan bentuk perlakuan konselor terhadap konseli menurut budayanya. Hal ini dapat diartikan juga bahwa konseling multibudaya merupakan layanan bantuan kepada konseli dengan memperhatikan latar budayanya.

Berdasarkan pemaparan tersebut, secara luas dapat dikatakan layanan konseling yang diberikan pada konseli yang berbeda latar belakang budayanya dengan konselor adalah konseling multibudaya. Konselor perlu memiliki kompetensi konseling multibudaya agar proses konseling dengan konseli yang berbeda budaya dapat berjalan efektif. Seorang profesional secara multibudaya memiliki kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan untuk bekerja dengan masyarakat yang beragam dan menerapkan strategi dan teknik yang konsisten dengan pengalaman hidup dan nilai-nilai budaya klien mereka (Lee, 2006; Delgado, 2011). Oleh karena itu, seorang konselor profesional yang bekerja memberikan layanan kepada konselinya dengan latar belakang budaya yang beragam diharapkan memiliki kompetensi konseling multibudaya.

Kompetensi konseling multibudaya konselor profesional sejatinya sudah mulai ditumbuhkan pada saat mengenyam pendidikan di program sarjana Bimbingan dan Konseling. Hal ini dapat dilihat dari adanya kredit mata kuliah Bimbingan dan Konseling Lintas Budaya serta Bimbingan dan Konseling Populasi Khusus. Mata kuliah tersebut dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan mengenai keragaman budaya, namun kurang menekankan pada keterampilan konseling multibudaya yang harus dimiliki mahasiswa ketika

berhadapan langsung dengan peserta didik yang multibudaya atau dapat dikatakan mata kuliah yang berkaitan dengan kompetensi konseling multibudaya S1 Bimbingan dan Konseling dirancang untuk membekali calon konselor agar memiliki kompetensi multibudaya masih dalam ranah akademik. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Supriadi (2001, hlm. 34) bahwa di banyak negara (termasuk di Indonesia), kurikulum pendidikan konselor tidak memberikan perhatian yang selayaknya terhadap pengenalan budaya terhadap para calon konselor, dan demikian juga dalam praktik-praktik yang dijalannya. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa kompetensi konseling multibudaya mahasiswa masih terbatas pada pengetahuan secara akademik belum pada ranah praktis.

Jika kompetensi konseling multibudaya mahasiswa calon Guru BK dan Konselor masih terbatas pada pengetahuan secara akademik, maka untuk meningkatkan kompetensi konseling multibudaya tersebut dapat dilakukan pada Pendidikan Profesi Konselor (PPK), pada jenjang pendidikan selanjutnya yaitu Program Magister (S2), dan program pelatihan yang efektif untuk meningkatkan kompetensi konseling multibudaya konselor.

Pengembangan kompetensi multibudaya konselor selama ini dilakukan melalui pelatihan di ruang kelas, pemahaman dan praktik lapangan, pelatihan keterampilan konseling multibudaya mahasiswa program magister, pengembangan kompetensi multibudaya melalui perkuliahan konseling multibudaya, dan proyek seperti *multicultural action project* (Budiman, N, 2016, hlm. 3).

Pelatihan *Multicultural Action Project* (MAP) diasumsikan dapat memfasilitasi peningkatan kompetensi konseling multibudaya Guru BK. *Multicultural Action Project* (MAP) merupakan sebuah proyek pencampuran budaya yang dikembangkan oleh Dr. Max Parker pada Universitas Florida, dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan untuk bekerja dengan konseli yang berlatar belakang budaya yang berbeda (Lee, 2009; Delgado, C. P. H., *et al*, 2011, hlm. 405). Berdasarkan pemaparan tersebut, maka diketahui bahwa tujuan dari *Multicultural Action*

*Project* (MAP) sesuai dengan kerangka pikir dan subkompetensi konseling multibudaya. Hal ini diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Delgado, C. P., *et al* ( 2011, hlm. 406) yang menyatakan bahwa kerangka berpikir kompetensi konseling multibudaya yang dikemukakan oleh Sue, dkk., yang meliputi kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan, merupakan kerangka pikir yang ditekankan pada *Multicultural Action Project* (MAP). Kerangka pikir ini dipilih karena merupakan kerangka pikir kompetensi konseling multibudaya yang ditetapkan oleh *American Counseling Association* (ACA) dan *Association of Multicultural Counseling and Development* (AMCD).

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Secara operasional, permasalahan dijabarkan pada pertanyaan penelitian yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran awal kompetensi konseling multibudaya Guru BK SMA di Kota Bandung yang menjadi partisipan dalam Pelatihan *Multicultural Action Project* (MAP)?
2. Apakah pelatihan *Multicultural Action Project* (MAP) efektif dalam meningkatkan kompetensi konseling multibudaya Guru BK SMA di Kota Bandung yang menjadi partisipan dalam pelatihan?
3. Bagaimana dinamika perubahan kompetensi konseling multibudaya partisipan pada setiap sub kompetensi?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum penelitian adalah memperoleh data empirik tentang efektivitas Pelatihan *Multicultural Action Project* (MAP) untuk meningkatkan kompetensi konseling multibudaya Guru BK SMA di Kota Bandung. Sedangkan tujuan khusus penelitian adalah memperoleh fakta empirik tentang:

1. Gambaran awal kompetensi konseling multibudaya Guru BK SMA di Kota Bandung yang menjadi partisipan dalam Pelatihan *Multicultural Action Project* (MAP).

2. Keefektifan pelatihan MAP untuk meningkatkan kompetensi konseling multibudaya Guru BK SMA di Kota Bandung yang menjadi partisipan pelatihan.
3. Dinamika perubahan kompetensi konseling multibudaya partisipan pada setiap sub kompetensi.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian secara garis besar meliputi manfaat teoretis dan manfaat praktis yaitu sebagai berikut.

### **1. Manfaat Teoretis**

Secara teoretis hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya pengetahuan serta keilmuan bimbingan dan konseling mengenai kompetensi konseling multibudaya konselor sehingga dapat menjadi salah satu rujukan keilmuan dalam bidang kompetensi konseling multibudaya konselor. Manfaat teoretis penelitian selanjutnya adalah memberikan sumbangan bagi pengembangan teori mengenai model pelatihan untuk meningkatkan kompetensi konseling multibudaya konselor, sehingga dapat dijadikan salah satu sumber referensi pendidikan yang dapat dikaji dalam penerapan layanan konseling multibudaya dalam *setting* pendidikan formal maupun non formal.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian yang efektif mengenai model pelatihan dalam meningkatkan kompetensi konseling multibudaya dapat diimplementasikan oleh LPTK khususnya Program Studi Bimbingan dan Konseling, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (*ABKIN*), atau *stakeholders* lainnya dalam upaya meningkatkan kompetensi konseling multibudaya konselor.

Hasil penelitian dapat bermanfaat juga bagi penelitian selanjutnya yaitu diharapkan dapat menjadi acuan atau sumber rujukan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kompetensi konseling multibudaya konselor serta dapat menjadi stimulus untuk dapat mengembangkan penelitian-penelitian

yang lebih inovatif dan efektif dalam upaya peningkatan kompetensi konseling multibudaya konselor.

Manfaat selanjutnya diharapkan dapat dirasakan oleh Guru BK sebagai praktisi pelaksana layanan konseling di sekolah. Guru BK diharapkan dapat meningkatkan kompetensi konseling multibudayanya dengan menerapkan atau mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi konseling multibudaya yang efektif sehingga layanan konseling dengan konseli yang berbeda latar belakang budaya dapat berjalan efektif tanpa menghilangkan potensi-potensi budaya yang terdapat pada diri konseli ataupun guru BK sendiri.

#### **F. Struktur Organisasi Tesis**

Struktur organisasi tesis terdiri dari lima bab. Bab I Pendahuluan, yang memaparkan latar belakang penelitian yang meliputi alasan ketertarikan pengkajian permasalahan penelitian, gejala-gejala kesenjangan yang terjadi di lapangan, dampak jika kondisi dalam penelitian tidak dikembangkan, strategi yang digunakan dalam mengembangkan kondisi dalam penelitian. Selain itu dalam Bab I dipaparkan pula identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur penyusunan tesis. Bab II merupakan kajian pustaka, yang berisi konsep-konsep atau teori-teori utama dalam bidang yang dikaji, penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang dikaji, serta kerangka pemikiran. Bab III merupakan metode penelitian, dalam bab ini dijelaskan secara rinci, lokasi dan subjek populasi atau sampel penelitian, desain serta metode yang digunakan dalam penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, proses pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data serta analisis data. Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab V berisi kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi.